KR-Surya Adi Lesmana

DAMPAK PANDEMI DAN MERAPI: Objek Wisata Tlogo Putri Kaliurang Sleman sepi kunjungan, Kamis (4/2). Perpanjangan masa tanggap darurat Covid-19 sekaligus status Siaga Gunung Merapi dikeluhkan para pedagang dan pelaku pariwisata daerah setempat karena berdampak serius pada pendapatan mereka.

Tanah Bergerak, 6 KK Terancam Longsoran

SLEMAN (KR) - Tanah tebing yang berada di Losari RT 4 RW 6 Wukirharjo Prambanan bergerak. Kondisi itu akan mengancam 6 Kepala Keluarga (KK) yang berada di bawahnya. Untuk sementara saat turun hujan, warga mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sleman Makwan STp MT mengungkapkan, laporan adanya tanah tebing bergerak itu pada Senin (1/2). Awalnya terjadi hujan lebat di wilayah tersebut yang mengakibatkan rekahan tanah 30 cm. "Saat itu terjadi hujan dengan durasi yang cukup panjang. Dampaknya rekahan tanah dan mengangkat cor blok jalan," ungkapnya kepada *KR*, Kamis (4/2).

Menurutnya, panjang tanah yang bergerak 30 m, lebar 25 m dan tinggi trap 5 m. Kondisi tersebut akan mengancam 6 KK yang terdiri dari 15 KK yang rumahnya di bawah tebing tersebut. "Jika terjadi longsoran, rumah yang berada di bawahnya terancam. Dari 15 jiwa itu, ada lansianya 1 orang dan balita 2 anak," terang Makwan.

Melihat kondisi tersebut, warga yang ada di bawah terbing mengungsi ke tempat aman jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Hal itu untuk antisipasi terjadi longsoran. "Ketika hujan lebat dengan durasi yang panjang, mereka pindah ke tempat yang aman. Tujuannya untuk antipasi jika sewaktu-waktu longsor," ucapnya.

Untuk sementara, rekahan tanah itu ditutup dengan tujuan menutup rekahan. Hal itu antisipasi bila terjadi hujan, air masuk ke rekahan dan membuat alur air agar tidak masuk di area tanah yang bergerak. "Ya antisipasi hanya dengan menutup rekanan tanah agar tidak kemasukan air saat hujan. Karena ketika kemasukan air, sangat rawan tanah bergerak dan terjadi longsor," tambah Makwan. **(Sni)-f**

Polda DIY Miliki 2 Alat GeNose C-19

SLEMAN (KR) - Screening Covid-19 menggunakan alat pendeteksi GeNose, kini menjadi kebiasaan baru di Polda DIY. Sejak satu bulan lamanya, kebiasaan baru itu dilakukan. Namun karena keterbatasan material, screening cepat terhadap Covid-19 itu baru dilakukan pada saat-saat atau kondisi tertentu.

Seperti uji GeNose C-19 yang dilakukan terhadap 150 personel yang terlibat dalam Satgas Aman Nusa Progo di Mapolda, Rabu (3/2). Mereka adalah anggota yang dibentuk dalam sebuah tim yang tugasnya mendukung kegiatan yang dilakukan BPBD Provinsi DIY selama pandemi Covid-19. "Kita laksanakan pemeriksaan yang berkaitan dengan kesehatan personel yang terlibat Satgas Aman Nusa yang selama ini berada di lapangan. Alhamdulillah mereka dalam kondisi tidak terpapar Covid-19," ujar Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Yuliyanto di kantornya, Kamis (4/2).

Kabid mengungkapkan, Polda DIY mempunyai dua alat GeNose yang digunakan di Dokkes Mapolda DIY dan RS Bhayangkara. Meskipun satu alat berada di RS Bhayangkara, namun penggunaannya masih terbatas untuk anggota dan keluarganya. Hal itu dikarenakan keterbatasan material yakni berupa kantong plastik yang digunakan untuk menampung hembusan napas. Padahal, setiap anggota yang akan dites, membutuhkan satu kantong plastik dan tidak bisa digunakan ulang. Ke depan, penggunaan GeNose juga akan diterapkan di Polresta dan semua Polres yang ada di jajaran.

"Anggota yang bergejala bisa melakukan pemeriksaan di Polda DIY atau di RS Bhayangkara menggunakan GeNose. Polres nanti juga akan lakukan pemeriksaan menggunakan GeNose, namun saat ini belum bisa dilakukan karena keterbatasan material kantong plastik," pungkasnya. **(Ayu)-f**

Mahasiswa Bantu Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi

SLEMAN (KR) - Mahasiswa KKN PPM UGM Unit JT388, (Kabupaten Karanganyar) dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Dra Eko T Sulistyani MSc menyelenggarakan webinar bertema 'Strategi Pemerintah dan Perspektif Mahasiswa dalam Upaya Pemulihan Dampak Pandemi pada Sektor Ekonomi', Selasa (2/2). Program ini sebagai wujud komitmen mahasiswa KKN PPM UGM membantu pemerintah daerah dalam memulihkan dampak ekonomi akibat pandemi.

Webinar menghadirkan narasumber utama Gubernur Jawa Tengah sekaligus Ketua Umum Kagama Ganjar Pranowo dan Presiden Mahasiswa BEM KM UGM 2020 M Sulthan Farras Nans. Webinar dibuka Sekretaris Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat UGM, Rachmawan Budiarto ST MT diikuti antara lain Bappeda Karanganyar, Camat Karanganyar bersama ratusan peserta dari masyarakat Kelurahan Tegalgede, Bejen, Popongan Karanganyar serta mahasiswa KKN PPM UGM.

Ganjar Pranowo meminta mahasiswa KKN PPM UGM ikut andil dalam kegiatan ekonomi di dalam masyarakat. Ada 6 peran mahasiswa guna pemulihan dampak pandemi di sektor ekonomi. Pertama, mahasiswa diminta untuk berkampanye pencegahan penularan Covid-19, lalu turut serta untuk mendampingi startup anak muda, menciptakan wirausaha baru berkualitas, membantu persiapan UMKM agar dapat masuk dunia digital.

Kemudian, turut menyosialisasikan dan mendampingi masyarakat dalam sektor UMKM, pertanian, dan pariwisata selama masa pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi. Melaksanakan KKN tematik sesuai kondisi dan potensi masyarakat setempat untuk mendukung pemulihan ekonomi. Membeli produk usaha masyarakat dapat pula membantu meningkatkan dan mempertahankan kehidupan ekonomi.

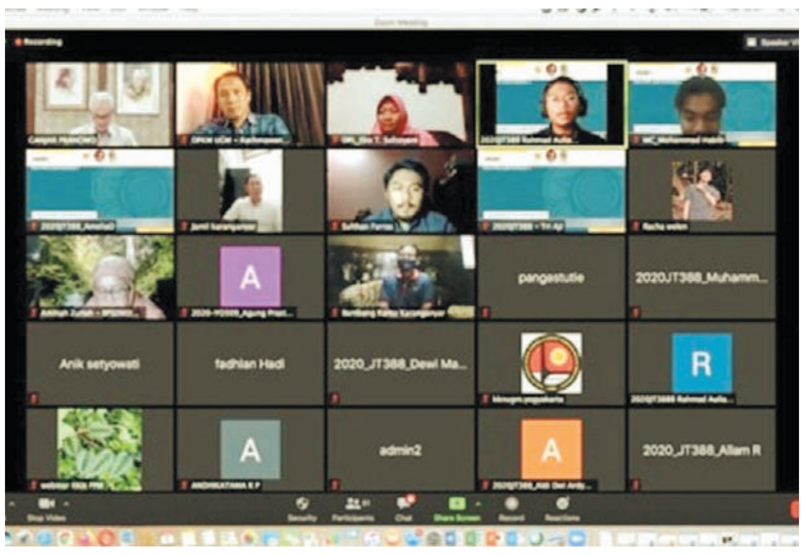
KR-Istimewa

Webinar diselenggarakan mahasiswa KKN PPM UGM Unit JT388.

"UGM tidak pernah mendidik mahasiswanya sebagai penakut. Dan satu-satunya usaha yang paling mudah dalam memutar ekonomi dan memajukannya yaitu dengan berperilaku hedon pada produk dalam negeri," pesan Ganjar.

Sementara M Sulthan Farras Nans mengatakan, kunci bangkitnya UMKM adalah meningkatkan daya beli masyarakat (insentif pekerja, bansos tunai, relaksasi pajak pendataan). Selain itu kemudahan mendapat kredit murah (Program KUR ultra mikro oleh OJK dan BI), serta meningkatkan akses pemasaran produk melalui media digital lewat e-commerce. "Melalui cara-cara ini akan memunculkan harapan bahwa ekonomi lokal dapat terus bergerak," katanya. **(Dev)-f**

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIOPTIMALKAN

Dewan Dorong Kebangkitan Ekonomi

KR-Istimewa

Ardi saat menjadi narasumber dalam Musrenbang Kapanewon Berbah.

BERBAH (KR) - DPRD Kabupaten Sleman mendorong kalurahan menjadi tonggak kebangkitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Untuk itu pemberdayaan masyarakat dan memanfaatkan potensi kalurahan harus lebih dioptimalkan.

Anggota DPRD Kabupaten Sleman H Ardi SAg mengatakan, selama pandemi Covid-19, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun cukup signifikan. Di mana sebelumnya PAD 2020 ditargetkan Rp 1 triliun turun 40 persen. "Dampaknya cukup luar biasa pandemi ini. Bahkan anggarannya sempat refocusing karena anggarannya untuk penanganan Covid-19," ungkapnya pada Musrenbang di Kapanewon Berbah, Kamis (4/2).

Untuk mendorong membangkitkan ekonomi, 70 persen anggaran lebih difokuskan pada kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat. Kemudian 30 persen untuk pembangunan infrastruktur. "Anggaran saat ini lebih diutamakan pada pemberdayaan UMKM dan pendampingan masyarakat melalui program-program penguatan di kalurahan. Untuk itu kami mendorong kebangkitan ekonomi ini berasal dari kalurahan," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, program yang dapat dilakukan kalurahan di antaranya kalurahan preneur. Yakni kalurahan membangkitkan ekonomi melalui BUMDes, kelompok-kelompok usaha dan UMKM. "Keberadaan BUMDes maupun kelompok-kelompok usaha dan UMKM perlu dioptimalkan. Dengan harapan ekonomi masyarakat cepat bangkit," paparnya. **(Sni)-f**

SAMPAI TANGGAL 28 FEBRUARI

Status Tanggap Darurat Merapi Diperpanjang

SLEMAN (KR) - Bupati Sleman akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Bencana Gunungapi Merapi. Dengan keluarnya SK ini, tanggap darurat Merapi diperpanjang hingga 28 Februari 2021.

Menurut Kabag Humas Pemkab Sleman Dra Shavitri Nurmala Dewi, berdasarkan laporan hasil pemantauan aktivitas Gunungapi Merapi dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta Nomor:48/45/BGV. KE/202 1, tanggal 28 Januari 2021 telah terjadi peningkatan aktivitas vulkanik Gunungapi Merapi. Sehingga status aktivitas Gunungapi Merapi tetap pada status Siaga (Level III).

"Dengan adanya potensi bahaya berupa guguran lava, lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif, luncuran awan panas sejauh 5 km, Pemkab Sleman direkomendasikan untuk melakukan mitigasi bencana akibat letusan Gunungapi Merapi yang bisa terjadi setiap saat," ujar Evi, panggilan akrab Shavitri di kantornya, Kamis (4/2).

Dijelaskan, situasi saat ini terdapat 145 jiwa pengungsi warga Padukuhan Turgo, Kalurahan Purwobinangun Kapanewon Pakem di barak Pengungsian Purwobinangun. Selain itu ada 10 jiwa warga Padukuhan Ngrangkah Kalurahan Umbulharjo Cangkringan di barak pengungsian Plosokerep Umbulharjo Cangkringan yang harus dipenuhi kebutuhan dasarnya.

Terkait itu, Bupati Sleman memutuskan untuk mengeluarkan SK tentang Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Bencana Gunungapi Merapi di Kabupaten Sleman mulai tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 28 Februari 2021. Status tanggap darurat ini dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi dari perkembangan yang terjadi.

"Pemerintah Daerah dan masyarakat segera mengambil langkah-langkah tanggap darurat bencana Gunungapi Merapi sesuai rekomendasi untuk evaluasi dan pengungsian. Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dapat dibebankan pada APBN dan APBD serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat," tambah Evi. **(Has)-f**